

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Landasan Teori

Didalam bab ini, peneliti memaparkan konsep-konsep yang dipergunakan untuk menunjang asumsi dan bermanfaat untuk menganalisis hasil penelitian. Peneliti menginterpretasikan konsep yang diaplikasikan sebagai acuan bagi pemecahan masalah penelitian yang dilakukan serta masalah hipotesis.

Teori yaitu garis nalar (logika), seperangkat opini, penjelasan, dan asumsi yang terorganisir secara terstruktur. Umumnya, teori memiliki tiga manfaat: memaparkan (*explain*), memprediksi (*predict*) serta mengendalikan (*control*) (Sugiyono, 2019).

2.1. 1 Legitimacy Theory (Teori Legitimasi)

Legitimasi yaitu kapasitas psikis yang berpihak pada individu dan sekelompok orang yang sebenarnya rentan dengan pengaruh lingkungan, fisik maupun non fisik. Legitimasi merupakan metode manajemen bisnis yang dirancang agar berdiri berdampingan dengan masyarakat, kelompok masyarakat serta pemerintah (Karyawati et al., 2017). Perusahaan atau organisasi perlu menerapkan legitimasi sebagai batasan yang dititkberatkan atas adat dan norma masyarakat. Sehingga dalam mengatasi batasan tersebut menjadi penting untuk menganalisis perilaku organisasi yang relevan dengan lingkungan (Ghozali, 2020).

Menurut Wardhani & Cahyonowati, (2011) teori legitimasi adalah asumsi umum bahwa kegiatan perusahaan didasarkan pada dan mematuhi konsep masyarakat, nilai-nilai, keyakinan, dan keputusan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa bisnis harus menetapkan tujuan yang sejalan dengan masyarakat. Untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, satu hal yang bisa dilaksanakan perusahaan yaitu menerbitkan laporan keberlanjutan yang memaparkan kewajiban sosial beserta lingkungannya. Perusahaan terus mengupayakan legitimasi melalui penerbitan laporan keberlanjutan berharap unitnya tetap bertahan dan diterima masyarakat (Adhipradana & Daljono, 2014).

Kartini, (2013) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan perhatian yang diberikan pada norma sosial masyarakat karena organisasi merupakan komponen dari masyarakat, maka perusahaan dapat dibenarkan dengan mematuhi norma-norma sosial. Artinya, teori ini merupakan dasar pada pelaku bisnis dengan mengingat kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan nilai-nilai perusahaan dengan aturan sosial yang legal di kawasan perusahaan beroperasi.

Mendasari teori legitimasi yaitu perjanjian sosial yang terbentuk antara bisnis dan komunitas bahwa bisnis berproses dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi (Chariri & Ghozali, 2007). Apa yang disampaikan masyarakat terhadap perusahaan dan apa yang dibutuhkan perusahaan dari masyarakat dapat dikaji melalui legitimasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa bahwa eksistensi dan aktivitas perusahaan dapat diberi “status” (legal) dari masyarakat atau lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Ghozali, 2020).

Teori legitimasi mendorong perusahaan agar memastikan bahwa kegiatan serta kinerja mereka mampu diakui secara sosial. Perusahaan mengaplikasikan laporan tahunannya untuk menciptakan persepsi tentang kewajiban lingkungan, serta perusahaan dapat diakui masyarakat. Setelah diakuinya komunitas baru, diharapkan bisa menumbuhkan performa perusahaan, serta mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Aziza, 2014). Legitimasi ini mampu memotivasi atau meyakinkan investor untuk membuat putusan investasi (Tommy et al., 2015).

Alasan memakai teori legitimasi sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah, perusahaan akan konsisten memastikan bahwa praktik operasinya diterima bagi masyarakat. Selain itu, pengungkapan ini akan bermanfaat dan memenuhi harapan *stakeholders* (Fauzi, 2021).

2.1. 2 Stakeholders Theory (Teori Pemangku Kepentingan)

Stakeholder yaitu sejumlah pemangku kepentingan internal ataupun eksternal dan berkaitan langsung atau tidak langsung bersama perusahaan. Tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik saham, perusahaan pun bertanggung jawab pada pemangku kepentingan (karyawan, kreditor, pelanggan, distributor, pemerintah,

publik, dan pemangku kebijakan lainnya) (Ghozali, 2020). Mulanya didalam pelaporan keuangan hanya menilai tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi (*economic focus*), sekarang perusahaan perlu mempertimbangkan aspek sosial (*social aspek*) bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal (Karyawati et al., 2017).

Menurut Wati, (2019), teori *stakeholder* merupakan rangkaian prosedur dan penerapan yang terkait dengan upaya komunitas bisnis untuk berkontribusi pada pemangku kepentingan, norma, ketaatan terhadap peraturan, pengakuan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Freeman, (2001) menyatakan pada dasarnya teori ini adalah menggambarkan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan perlu menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, terutama yang memiliki kewenangan atas kesiapan sumber daya yang dipergunakan dalam menjalankan usahanya, seperti: pekerja, produk perusahaan, pangsa pasar serta lainnya (Chariri & Ghozali, 2007).

Menurut Jones & Wicks, (1999) mendeskripsikan *stakeholder* ke dalam dua kelompok:

1. Pemangku kepentingan internal yang terdiri dari sekelompok orang yang tertarik dan mengklaim kapabilitas perusahaan dan berkedudukan di dalam organisasi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah pemilik saham, manajemen dan pegawai.
2. Pemangku kepentingan eksternal, termasuk mereka yang bukan pemilik perusahaan dan mereka yang terlibat bukanlah eksekutif perusahaan atau karyawan perusahaan, tetapi tertarik pada perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan perusahaan. Pihak-pihak yang masuk kedalam kelompok ini yaitu klien (*customer*), penyuplai (*supplier*), pemerintah, komunitas, dan kelompok lainnya.

Perusahaan tidak hanya harus bertindak bagi kepentingannya sendiri, melainkan juga menguntungkan pemangku kepentingannya (pemilik saham, kreditor, pelanggan, penyalur, pemerintah, publik, analis, dan pemangku kepentingan lainnya). Satu cara yang ada agar perusahaan memelihara interaksi bersama pemangku

kepentingan ialah melalui penerbitan laporan keberlanjutan dan memberikan informasi tentang performa ekonomi, sosial dan lingkungan (Sejati & Prastiwi, 2015). Pengungkapan ini diharapkan dapat melengkapi tujuan informasi perusahaan, mengelola pemangku kepentingan, serta mendapatkan sokongan dari pemangku kepentingan yang mempengaruhi kesinambungan perusahaan (Wati, 2019).

Alasan menggunakan teori pemangku kepentingan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah karena teori pemangku kepentingan menjelaskan pentingnya interaksi antara perusahaan dengan pihak lain dan memiliki ketergantungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. (Pratama et al., 2020). Melalui salah satu prinsip GCG yaitu kewajaran, diharapkan perusahaan mampu memperhitungkan kepentingan pemilik saham juga pemangku kepentingan lainnya secara seimbang (Wawondos & Mustamu, 2014).

2.1. 3 Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yaitu informasi yang tidak sekadar mencakup penjelasan kinerja keuangan, melainkan bersama penjelasan non-keuangan termasuk laporan tentang kegiatan sosial serta lingkungan yang mengharuskan operasi bisnis berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan adalah animo penting untuk pengungkapan non-keuangan dan mencakup empat elemen pokok: *lanskap* bisnis, kebijakan, keterampilan, sumber daya dan kinerja (Bukhori & Sopian, 2017).

Menurut Karyawati et al., (2017) pelaporan keberlanjutan adalah bagian dari implementasi yang konsisten dari praktik tanggung jawab lingkungan dan sosial sukarela perusahaan. Pengungkapan sukarela adalah keputusan pengelolaan untuk menginformasikan akuntansi serta informasi lainnya dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan. Ini termasuk pelaporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan sebagai penilaian pertama kredibilitas perusahaan. Pedoman pelaporan keberlanjutan yang dilegalkan menurut internasional mengacu pada standar GRI, yang bertujuan bertujuan untuk mengukur kinerja bisnis, menentukan tujuan

dan mengatasi perubahan sebagai kerangka kerja yang berkelanjutan (Pratama et al., 2020).

Laporan keberlanjutan perusahaan menjelaskan performa organisasi dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan juga dilihat oleh perusahaan sebagai peningkatan kinerja keberlanjutan dengan memperkenalkan dan memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan diseluruh organisasi dengan meningkatkan integrasi ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Fauzi, 2021).

2.1.3. 1 Prinsip Pelaporan Keberlanjutan Sesuai GRI-G4

Global Reporting Initiative (GRI) yaitu lembaga yang menciptakan standar pelaporan keberlanjutan global pertama, yang disebut Standar GRI. GRI didirikan di tahun 1997 bertempat di Boston. Pedoman ini d untuk dapat dipergunakan secara umum bagi perusahaan di berbagai negara. Standar pedoman GRI terus diperbarui agar mencerminkan situasi aktual. GRI G4 adalah tolok ukur pelaporan baru yang dipublikasikan GRI di tahun 2013. Memperbarui panduan GRI3 ke GRI4 bertujuan untuk mendukung perusahaan mengembangkan laporan keberlanjutan dengan mempresentasikan informasi penting tentang masalah organisas. Indikator Kinerja GRI G4 tersusun kedalam tiga kategori utama: ekonomi, lingkungan serta sosial (Mauludy & Faiqoh, 2018).

Laporan keberlanjutan berdasarkan prinsipnya terbagi atas dua kelompok , yaitu (GRI, 2013):

1. Prinsip-prinsip untuk menetapkan isi laporan.
Prinsip definisi isi laporan menggambarkan tahapan prosedur yang digunakan organisasi untuk menentukan isi mana yang akan dilaporkan dan didiskusikan, serta aktivitas, dampak, harapan, dan kepentingan pemangku kepentingannya.
2. Prinsip-prinsip dalam menetapkan kompetensi laporan.
Prinsip-prinsip dalam menetapkan kompetensi laporan menawarkan panduan tentang bagaimana meyakinkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, tercakup tampilan yang akurat. Kualifikasi informasi

menjadi relevan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat.

2.1.3. 2 Pengungkapan Standar

Pengungkapan standar terbagi kedalam dua pengungkapan, yaitu standar pengungkapan umum dan pengungkapan khusus (GRI, 2013).

2.1.3.2. 1 Standar Pengungkapan Umum

Informasi pedoman umum penting bagi sejumlah organisasi yang menghasilkan laporan keberlanjutan. Unit bisnis harus mendefinisikan informasi standar umum yang dapat dideklarasikan. Informasi umum standar dibagi menjadi tujuh bagian:

1. Ketentuan dan penjabaran,
2. Gambaran organisasi,
3. Masalah material dan batasan yang dipersepsikan
4. Interaksi dengan pemangku kepentingan,
5. Bentuk laporan,
6. Manajemen, dan
7. Kepatuhan juga kejujuran.

2.1.3.2. 2 Standar Pengungkapan Khusus

Standar tersebut mengklasifikasikan standar pengungkapan khusus dalam 3 bagian: ekonomi, lingkungan juga sosial. Kelompok sosial terbagi lagi menjadi empat subkategori: implementasi kepegawaian dan keamanan beraktivitas, hak asasi manusia, publik serta tanggung jawab akan produksi.

Informasi laporan keberlanjutan organisasi berisi tentang elemen material, dimana dampak elemen dianggap krusial oleh organisasi. Elemen material yaitu elemen yang menggambarkan pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi yang relevan pada penilaian pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini memilih menggunakan pengungkapan standar khusus, dimana penelitian ini dilakukan secara komprehensif terhadap ketiga aspek dalam

pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memiliki fungsi yang beragam. Dari sisi perusahaan, hal ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja perusahaan, dan investor dapat melihat laporan keberlanjutan sebagai sarana monitoring kinerja perusahaan dan dapat menjadi media pengambilan keputusan. Bagi pemangku kepentingan, komitmen perusahaan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan mendukung perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan (Chandra & Delvianti, 2020).

2.1. 4 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) yaitu metode pemantauan dan pengendalian operasi bisnis guna mewujudkan tolak ukur bagi semua pemangku kepentingan. Di Indonesia, prinsip GCG dapat diinterpretasikan sebagai wujud manajemen perusahaan yang baik. GCG menegaskan pada dua pendapat. Pertama, mendasarnya wewenang pemilik saham atas laporan yang terperinci serta tepat waktu. Kedua, perusahaan wajib mengungkapkan keseluruhan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan, kewenangan dan pihak-pihak terkait secara lengkap, tepat waktu, dan terbuka untuk umum (Rosafitri, 2017).

Good Corporate Governance (GCG) sebagai satu faktor *non-finansial* (non-keuangan) serta perlu diawasi oleh suatu perusahaan dalam rangka mengoptimalkan laba dan kinerja keuangannya. GCG adalah tata kelola perusahaan yang mempraktikkan landasan keterbukaan, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab serta ketidakberpihakan (Setyawan, 2019).

2.1.4. 1 Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia

Pemerintah merubah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk mendukung penerapan GCG. Kebijakan GCG mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerapkan 5 prinsip GCG yang diketahui sebagai prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*) (Hasnati, 2014):

1. Transparansi, ialah kejelasan ketika melakukan prosedur pengambilan putusan dan kredibilitas dalam menyajikan informasi penting dan bermanfaat bagi perusahaan.
2. Akuntabilitas, ialah ketetapan tugas organisasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar tata kelola perusahaan terwujud secara efisien.
3. Tanggung jawab, ialah ketaatan terhadap tata kelola perusahaan atas aturan undang-undang yang berlaku serta standar bisnis yang baik.
4. *Independensi*, ialah kondisi dimana perusahaan dilaksanakan dengan kompeten dan tidak terpengaruh kepentingan serta paksaan dari berbagai kelompok yang tidak searah dengan aturan undang-undang yang sah dan dasar kaidah bisnis.
5. Kewajaran, ialah pelaksanaan wewenang pemangku kepentingan harus
 - seimbang dan sesuai dengan kesepakatan serta undang-undang yang sah .

2.1.4. 2 Organ Pelaksana *Good Corporate Governance* (GCG)

2.1.4.2. 1 Organ Utama *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organisasi perseroan ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Korporasi ini pun disebut sebagai badan utama GCG karena memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan GCG.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - a. Pemegang saham perseroan ialah perusahaan investasi yang memperoleh izin untuk berdagang sebagai perantara pedagang efek dan tidak mempunyai ikatan langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan lain yang memiliki 20% hak suara mereka.
 - b. RUPS berwenang mengangkat anggota komite dan anggota dewan setelah menerima hasil uji tuntas dan penilaian kepatuhan.

2. Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris berperan selaku pengawas umum dan ataupun khusus serta memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan anggaran dasar.
- b. Penunjukan dan/atau pembaruan anggota Komisi dilaksanakan oleh RUPS sesudah lulus uji kompetensi serta kepatuhan yang dilaksanakan oleh Komisi yang dibangun oleh Ketua Bapepam LK.
- c. Dewan Komisaris terdiri dari jumlah yang tepat untuk melaksanakan tugas pengawasannya secara mandiri dan memastikan pengambilan ketentuan yang efektif.
- d. Susunan dan persyaratan total panitia mengacu pada peraturan Bapepam LK yang berlaku.
- e. Tanggung jawab pokok Dewan Komisaris yaitu memantau ketetapan Direksi serta menyampaikan rekomendasi pada Direksi terhadap tindakan perusahaan.

3. Direksi

- a. Direksi berwenang mewakili perseroan secara hukum dan diluar hukum sebanding dengan Anggaran Dasar, dan berkewajiban penuh atas operasional perusahaan.
- b. Penunjukan dan/atau pembaruan anggota dewan dilaksanakan pada RUPS setelah melalui pemeriksaan kompetensi serta kepatuhan yang dilaksanakan oleh komite yang dibangun oleh Ketua Bapepam LK.
- c. Direksi terdiri dari jumlah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi yang ditugaskan dan meninjau keefektifan ketetapan.
- d. Susunan dan total direksi mengacu pada ketentuan Bapepam LK yang berlaku.
- e. Tugas utama direksi adalah mengurus perusahaan untuk keperluan perusahaan dan sesuai dengan harapan perusahaan.

2.1.4.2. 2 Organ Pendukung *Good Corporate Governance* (GCG)

Organ pendukung yaitu lembaga yang membantu entitas dalam menjalankan misi dan wewenangnya, terutama dalam penerapan GCG. Organ pendukung mencakup:

1. Komite-komite yang membantu tugas Dewan Komisaris

Komite Komisaris yaitu anggota yang disusun oleh Dewan Komisaris yang dipandang perlu untuk menyelesaikan keputusan yang berlaku atau membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Peran Komite Audit adalah mendukung Dewan Komisaris meyakinkan untuk;

- i. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- ii. Pengendalian internal, manajemen risiko serta GCG sudah diterapkan oleh perusahaan.
- iii. Menjalankan fungsi audit eksternal dan internal sesuai rencana.

b. Komite Remunerasi

Komite Remunerasi yaitu komite yang disusun untuk mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi serta menyampaikan pendapat atas kompensasi Direksi dan Komisaris, termasuk proses penetapannya.

c. Komite lainnya, berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

- d. Uraian fungsi komite serta hal lainnya terkait dengan implementasi tugasnya disusun dalam Anggaran Dasar tiap komisi.

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

SPI adalah lembaga penunjang penerapan GCG, dan merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk menambah nilai dengan mengukur efektivitas manajemen risiko internal serta mengoptimalkan aktivitas perusahaan dengan prosedur yang teratur.

3. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan tugas yang dibuat untuk berkomunikasi antara pemilik saham dengan pemangku kepentingan lainnya, memelihara *image* perusahaan, dan berperan mengurus dokumen perusahaan. Sekretaris Perusahaan memperoleh akses langsung pada Direksi dan bekerja sama dengan departemen lain guna memperoleh laporan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan dari organ pelaksana GCG, penelitian ini menetapkan variabel Dewan Komisaris dan variabel Komite Audit. Dewan komisaris bertanggung jawab penuh melaksanakan pengawasan, meningkatnya jumlah anggota dewan komisaris, secara otomatis meningkatkan pengawasan yang terlaksana. Komite audit berperan penting karena pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Apabila perusahaan mempunyai Komite audit yang meningkat, maka semakin menjamin pencegahan serta pengendalian proses akuntansi dan keuangannya, yang berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Azizah & NR, 2020).

2.1. 5 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yaitu pengkajian yang dijalankan guna menentukan seberapa baik dan akurat suatu perusahaan menerapkan kerangka peraturan keuangan (Chandra & Delvianti, 2020). Kinerja keuangan suatu perusahaan erat kaitannya dengan fungsi serta peran manajemen dan menggambarkan salah satu parameter untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi untuk memperoleh target utamanya (Setyawan, 2019).

Hasil kinerja keuangan perusahaan adalah keberhasilan yang diperoleh perusahaan sepanjang kurun waktu tertentu, serta menggambarkan performa perusahaan sebagai prospek yang baik atau potensial, perkembangan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan (Bukhori & Sopian, 2017). Kinerja keuangan yang sehat akan mengoptimalkan keyakinan bagi penyandang dana. Peningkatan nilai

suatu perusahaan mewakili kekayaan pemegang saham, sehingga menjadi harapan perusahaan (Maryanti & Fithri, 2017).

Pengukuran serta evaluasi kinerja perusahaan erat kaitannya dengan kinerja keuangan. Ukuran keberhasilan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan aktivitas usahanya agar mampu berkompetisi bersama perusahaan lainnya (Indriati, 2018). Analisa rasio keuangan yaitu suatu alat yang bisa dipergunakan pada pengukuran kinerja keuangan. Rasio keuangan mengacu pada dua angka akuntansi di laporan keuangan dan mengklasifikasi satu angka bersama angka lainnya (Handini, 2020).

Umumnya analisa rasio keuangan digolongkan menjadi 5 rasio: rasio *likuiditas*, rasio operasi, rasio *leverage*, rasio *profitabilitas* dan rasio pasar (Aisyiah et al., 2013; Handini, 2020).

● Analisa rasio keuangan dalam praktiknya harus berhati-hati karena mempunyai sejumlah keterbatasan yang membuat ekspektasi keuntungan yang berbeda tidak dapat diprediksi. Keterbatasan utamanya adalah tidak memperhitungkan biaya dan pemanfaatan modal (*cost of capital*), sehingga belum mampu mempresentasikan kinerja yang diharapkan dan tidak mengetahui bahwa modal yang diajukan bisa memberikan keuntungan (*rate of return*). Dalam memenuhi batasan tersebut diperlukan pengukuran lain yaitu dengan menggunakan metode EVA. Metode EVA yaitu nilai tambah pada pemilik saham oleh manajemen pada waktu tertentu (Ningtias et al., 2014).

Kelebihan metode EVA diantaranya sebagaimana berikut (Rudianto, 2013):

- a. EVA mampu menyeimbangkan kebutuhan manajemen dengan harapan pemegang saham bila diaplikasikan sebagai indikator operasional keberhasilan manajemen dalam mewujudkan nilai pada pemegang saham.
- b. EVA menyampaikan prinsip manajemen guna menumbuhkan keuntungan aktivitas, mengeksplor dan menginvestasikan kredit (piutang) dan mencapai pengembalian yang tinggi tanpa tambahan modal.

- c. EVA adalah prosedur manajemen keuangan yang mampu menyelesaikan permasalahan bisnis, dimulai dari kebijakan mobilitas hingga putusan operasional rutin.

2.1.5.1 *Economic Value Added (EVA)*

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini mengaplikasikan teknik EVA. EVA adalah parameter kemampuan manajemen dalam memberikan tambahan nilai pada bisnisnya. Diasumsikan bahwa kinerja bisnis yang sehat dan efektif (diukur dari sudut pandang pertambahan nilai) tercermin dari kenaikan harga saham perusahaan. EVA secara transparan mempertimbangkan biaya modal dan mempertimbangkan bahwa biaya modal lebih besar daripada biaya utang karena tingginya tingkat risiko yang dihadapi pemilik modal (Segoro & Agustina, 2021).

EVA merupakan pendekatan untuk mengukur kinerja yang memperhitungkan kebutuhan penyandang dana dan investor. EVA adalah sisa keuntungan sesudah dikurangi biaya modal yang diinvestasikan untuk mencapai keuntungan tersebut. Nilai EVA yang positif bermakna manajemen perusahaan sudah merealisasikan tujuan. Sebaliknya, nilai EVA negatif bermakna perusahaan belum merealisasikan nilai tambah ekonomis (Susmonowati, 2018).

EVA dapat didefinisikan sebagai kriteria yang berguna untuk menentukan kompensasi manajemen di semua tingkatan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan saat ini mengaplikasikan EVA sebagai dasar utama dalam menentukan kompensasi manajemen. Mengingat indikator-indikator yang ada dalam laporan keberlanjutan dan salah satunya adalah aspek ekonomi, maka nilai tambah ekonomi dinilai mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan. Keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial mungkin memerlukan biaya pengungkapan, yang dapat mengurangi pendapatan (Armandani, 2022). Pada prinsipnya, EVA akan meningkat jika manajemen dapat mengoptimalkan kinerja tanpa tambahan modal. EVA ditentukan oleh dua faktor: tingkat pendapatan bersih dan biaya ekuitas, yang merupakan hasil dari penciptaan nilai dalam perusahaan. EVA mendukung manajer untuk meyakinkan bahwa unit usaha menghasilkan nilai pemegang saham. Di lain

sisi, penyandang dana dapat mengaplikasikan EVA untuk mengidentifikasi saham yang menambah nilai (Brigham & Houston, 2001).

Pendekatan EVA diharapkan dapat lebih realistis dalam menghitung nilai ekonomi perusahaan, dan peningkatan EVA akan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan (Abdullah, 2003). Manfaat menerapkan model EVA pada bisnis adalah (Handini, 2020):

1. Praktik model EVA dapat bermanfaat sebagai parameter kemampuan suatu perusahaan ketika dasar pertimbangan kinerja yaitu pada pembentukan nilai (*value creation*).
2. Evaluasi kinerja keuangan pada model EVA telah menarik minat pengelola sejalan bersama kebutuhan pemilik saham. Berdasarkan EVA, pengelola bertugas sebagai pemegang saham dengan menentukan investasi yang • menumbuhkan keuntungan dan mengurangi beban modal kemudian nilai perusahaan bisa dioptimalkan.
3. EVA mengoptimalkan perusahaan agar menambah pengawasan kualitas modalnya.
4. Investor bisa menggunakan EVA untuk menandai proyek atau aktivitas yang menawarkan besaran pengembalian yang lebih tinggi dibanding biaya modalnya.

Namun, EVA memiliki kelemahan dalam mengukur pendapatan saja. Tetapi, EVA tetap berguna sebagai acuan karena merupakan pertimbangan berupa biaya modal yang mengimbangi dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut (Aisyiah et al., 2013).

2. 2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan satu usaha penulis untuk menemukan perbedaan dan pendapat baru terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi bagian referensi penulis saat melaksanakan penelitian, dan penulis bisa menduplikasi konsep yang dipergunakan untuk memvalidasi penelitian saat ini. Beberapa penelitian lain yang menunjukkan kesamaan

diaplikasikan sebagai referensi dan kriteria yang dapat melengkapi penelitian ini. Selanjutnya penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Ikhwani et al., 2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengungkapan Sustainability Report Sebagai Variabel Intervening	Y = Return On Asset X1 = Total Asset X2 = Komite Audit X3 = Dewan Direksi Variabel moderasi : <i>Sustainability report</i>	1. GCG yang diukur dari total rapat komite audit berpengaruh kepada kinerja keuangan. 2. GCG yang dihitung dari total rapat dewan direksi tidak berdampak pada kinerja keuangan.
2.	(Ilma, 2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (<i>Effect Good Corporate Governance, Corporate Size, And Ownership Structure On Financial Performance</i>)	Y = Kinerja Keuangan X1 = Dewan Komisaris X2 = Dewan Direksi X3 = Komite Audit X4 = Ukuran Perusahaan X5 = Kepemilikan Institusional X6 = Kepemilikan Manajerial	1. Dewan Komisaris berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan. 2. Direksi tidak mempengaruhi kegiatan keuangan. 3. Komite audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan.
3.	(Önder & Baimurzin, 2020)	<i>Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosures: Evidence from Turkey</i>	Y= CSD (Corporate Sustainability Disclosure) X1= CEO (general manager, chairman) X2= CSR (corporate social responsibility) X3= CI (community influential)	Ukuran dewan, kehadiran anggota dewan independen, dan keberadaan komite tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor negatif yang, pada kenyataannya, mengurangi pengungkapan keberlanjutan perusahaan
4.	(Rahmadoni, 2021)	<i>The Effects of Good Corporate Governance and Company Status on Thea Company Financial Performance</i>	Y= Kinerja keuangan X1= GCG X2= Company status	1. Status Perusahaan berpengaruh terhadap GCG. 2. GCG berdampak pada kinerja keuangan. 3. Status perusahaan berdampak pada kinerja keuangan.

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
5.	(Rosafitri, 2017)	Interaksi <i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital</i> dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Y= Kinerja keuangan X1= <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) X2= <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) X3= <i>Intelectual Capital</i> (IC)	Dengan bersamaan, GCG, CSR serta IC mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan ditunjukkan oleh pengembalian aset dan pengembalian ekuitas.
6.	(Setyawan, 2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia)	Y= Kinerja keuangan (<i>Cash flow return on assets</i> (CFROA)) X1= GCG X2= Rasio komisaris independen X4= Jumlah komite audit X5= Ukuran perusaha X6= Profitabilitas (Return On Equity)	Perwakilan GCG, struktur kepemilikan institusi, komponen komisaris independen, serta total komite audit tidak berdampak pada kinerja keuangan. Kecuali total direksi yang berdampak signifikan pada kinerja keuangan.
7.	(Fauzi, 2021)	Disclosure Of Sustainability Report On Financial Performance	Y= Kinerja keuangan X1= Pengungkapan <i>sustainability report</i> dimensi ekonomi (EC) X2= Pengungkapan dimensi lingkungan laporan keberlanjutan (EN) X3= pengaruh antara pengungkapan <i>sustainability report</i> dimensi sosial (SO)	1. Aspek sosial (SO) laporan keberlanjutan tidak mempengaruhi kinerja keuangan. 2. Aspek lingkungan (EN) dan ekonomi (EC) berdampak positif pada kinerja keuangan.
8.	(Maryanti & Fithri, 2017)	<i>Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance</i> , Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan	Y1 = Kinerja Keuangan Y2 = Nilai Perusahaan X1 = CSR X2 = GCG X3 = Kinerja Lingkungan	Kepemilikan manajerial, direksi dan pejabat independen berdampak signifikan secara tidak langsung pada <i>goodwill</i> melalui kinerja keuangan
9.	(Rahman et al., 2020)	<i>Moderating Effect of Earnings Management in the Relationship between Sustainability Reporting Initiatives and Value Relevance</i>	Y= Earning Management X1= Laporan keberlanjutan	1. Laporan keberlanjutan secara positif mempengaruhi nilai ekuitas. 2. EM secara negatif memoderasi arah asosiasi ini

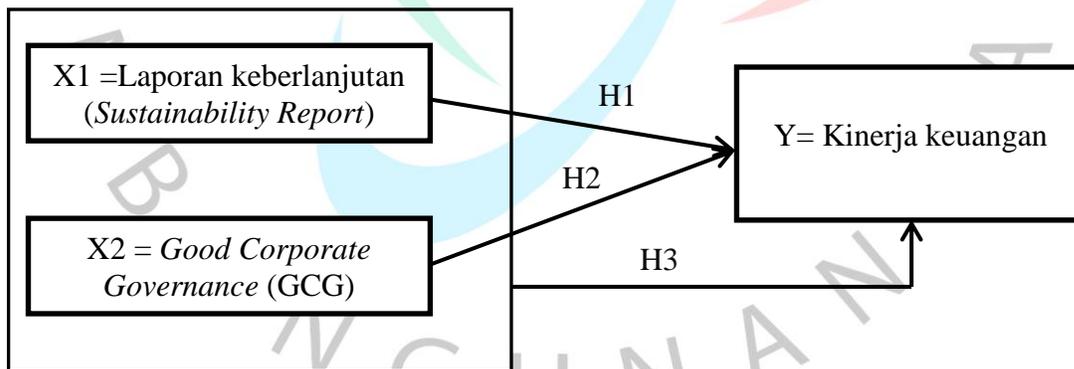
No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
10.	(Bukhori & Sopian, 2017)	Pengaruh Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Y= Kinerja Keuangan (ROA) X1= Pengungkapan Dimensi Ekonomi X2= Pengungkapan Dimensi Lingkungan X3= Pengungkapan Dimensi Sosial	Pemaparan performa ekonomi, lingkungan serta sosial berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan
11.	(Karyawati et al., 2017)	Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)	Y= Kinerja keuangan (<i>Return On Asset (ROA) & Current Ratio</i>) X1= Pengungkapan ekonomi X2= Pengungkapan lingkungan X3= Pengungkapan sosial	Pemaparan aspek ekonomi laporan keberlanjutan tidak berdampak signifikan pada profitabilitas serta likuiditas perusahaan.
12.	(Ariantika & Geraldina, 2019)	Implikasi Kecakapan Manajerial pada Laporan Keberlanjutan dan Kinerja Perusahaan	Y= Kinerja perusahaan / Profitabilitas (ROA) X1= Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	Menerbitkan laporan keberlanjutan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan.
13.	(Chandra & Delvianti, 2020)	Pengaruh Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Tembakau yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2017	Y= Kinerja Keuangan (ROA) X= Pengungkapan laporan keberlanjutan	Laporan keberlanjutan tidak berpengaruh signifikan pada ROA.
14.	(Sari & Utomo, 2019)	Pengaruh Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Terhadap Manajemen Laba	Y= Manajemen Laba X1= Pengungkapan laporan berkelanjutan (menggunakan indeks pengungkapan yang berpedoman pada GRI G4)	Pengungkapan laporan berkelanjutan berpengaruh negatif dan signifikan.
15.	(Jayantini & Sujana, 2018)	<i>Intervention of Sustainability Report Disclosure toward the Effect of Good Corporate Governance on Financial Performance</i>	Y1= Kinerja keuangan X1= Jumlah dewan komisaris X2= Komposisi komisaris independen X3= Komite Audit Variabel Intervensi= Pengungkapan laporan keberlanjutan	1. Publikasi laporan keberlanjutan berdampak positif pada kinerja keuangan. 2. Proporsi auditor independen serta ukuran komite audit berpengaruh pada kinerja keuangan yang dimediasi pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan pemenang penghargaan ASRRAT periode tahun 2016-2020. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada satu sektor perusahaan dan berpartisipasi dalam *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA). Alat ukur kinerja keuangan sebagai variabel dependen, menggunakan *Economic Value Added* (EVA), sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan rasio keuangan *profitabilitas*: pengembalian asset (ROA), pengembalian ekuitas (ROE), margin laba bersih (NPM)) dan *likuiditas*: rasio lancar (CR), rasio cepat (QR).

Penelitian ini menggunakan dua indikator penghitungan adalah laporan keberlanjutan dengan mengaplikasikan panduan pelaporan keberlanjutan dari GRI G4, ada sembilan puluh satu (91) indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai *indeks* (kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial), GCG yang diwakili dewan komisaris serta komite audit. Hasil penelitian ini diproses melalui *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 25.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir

2.5 Hipotesis

Berlandaskan tinjauan pustaka serta penelitian terkait dengan Gambar 2.1 di atas, hipotesis yang dijelaskan melalui penelitian ini ialah:

2.5.1 Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Ariantika & Geraldina, (2019), kinerja keuangan perusahaan dapat dioptimalkan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bukhori & Sopian, (2017), mengatakan jika pelaporan keberlanjutan, termasuk indikator kinerja ekonomi, lingkungan serta sosial, berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan. Serupa dengan penelitian Jayantini & Sujana, (2018), kinerja keuangan perusahaan berdampak positif pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

Farhana & Adelina, (2019), meyakini pengungkapan laporan keberlanjutan berdampak positif pada nilai perusahaan. Perihal tersebut menginformasikan jika publikasi laporan keberlanjutan mempunyai relevansi nilai yang dapat menggerakkan harga saham dan mengoptimalkan nilai pasar perusahaan.

Serupa dengan penelitian dari Insani, (2019), pengungkapan laporan keberlanjutan berdampak signifikan pada kinerja keuangan, serta keluaran penelitian ini pun membuktikan jika indikator ekonomi berdampak signifikan pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan performa ekonomi dalam laporan keberlanjutan menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan dan investor serta meningkatkan citra dan kinerja keuangan perusahaan. Berlandaskan pembahasan yang sudah diuraikan, selanjutnya hipotesis yang digunakan penulis adalah:

H1 = Laporan Keberlanjutan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

2.5.2 *Good Corporate Governance* (GCG) Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut hasil penelitian dari Rahmadoni, (2021), jika GCG berdampak positif pada kinerja keuangan. Peneliti lain yang mendukung pendapat ini Maryanti & Fithri, (2017), GCG, dewan komisaris serta komisaris independen secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Searah bersama penelitian yang dilaksanakan Ikhwan et al., (2019); Ilma, (2021), mengatakan dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan perusahaan.

Nugraha & Hwihanus, (2019) melakukan penelitian terhadap industri perbankan, bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Depositor secara positif menyadari bank yang beroperasi dengan tanggung jawab serta akuntabilitas, keamanan menyimpan uang di bank dijamin keamanannya oleh bank. Debitur pun merasa diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan, serta pengelolaan bank yang dikerjakan secara independen dari berbagai pihak yang tidak berwenang. Dengan menerapkan GCG di bank bisa meminimalkan risiko yang muncul dari kegiatan perbankan dan bisa menurunkan potensi kerugian serta memperoleh keuntungan yang optimal.

Menurut Suryanto & Refianto, (2019), penerapan GCG yang diwakili komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, selanjutnya hipotesis yang digunakan penulis adalah:

H2 = *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.5. 3 Pengungkapan Laporan Berkelanjutan dan *Good Corporate Governance*, Secara Bersamaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Gaol & Noviyanti, (2022), menunjukkan bahwa laporan berkelanjutan dan GCG secara bersamaan berdampak signifikan pada kinerja keuangan. Menurut Kristiani & Werastuti, (2020), bahwa GCG mempengaruhi performa lingkungan pada kinerja keuangan. Menurut Rosafitri, (2017), secara simultan GCG dan laporan berkelanjutan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dinyatakan dalam pengembalian asset (ROA) dan pengembalian ekuitas (ROE). Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, selanjutnya hipotesis yang digunakan penulis adalah:

H3 = Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan *Good Corporate Governance*, secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan